

# Pengaruh Ideologi Politik Islam di Indonesia Terhadap Partai Politik di Indonesia. Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera

Mohammad Riza Widyarsa<sup>1\*</sup>, Syafiuddin Fadlillah<sup>2</sup>, Randi M. Ramdhani<sup>3</sup>, Fahmi Salsabilla<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Al Azhar Indonesia,

Jl. Sisingamangaraja, Jakarta 12110. No.Telp : 021.-7244456, Fax : 021-72792753, \*email : [riza@uai.ac.id](mailto:riza@uai.ac.id)

**Abstract - Partai Keadilan Sejahtera (Justice and Prosperity Party) better known as PKS, which was established in 1998 in Jakarta, often associated as Muslim Brotherhood (Ikhwanul Muslimin/ IM) branch in Indonesia. The PKS ideology shared similarities with IM, which is the political Islam. This can be seen by looking at the ideological base of PKS which is Islam, not Pancasila. The purpose of this research is to see whether PKS is the branch of IM in Indonesia.**

**This research was conducted using qualitative method. Interviews with PKS members in Jakarta and library research were conducted to gather the data. The time taken to conduct this research were four months and was taken place in Jakarta.**

**From the research that was done, it can not be proven whether there is any connection between PKS and IM. There is no sufficient data to prove that PKS is IM branch in Indonesia. Pragmatic steps that often taken by PKS in conducting political affairs, are contrary to that of IM. The PKS members also rejecting the idea that PKS is affiliated with IM.**

**Keywords - Partai Keadilan Sejahtera, Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood), Islam, Politics**

## I. LATAR BELAKANG MASALAH

Hubungan Ideologi dan pemikiran serta politik antara Timur Tengah dan Indonesia mulai terjadi manakala Muhammad Natsir pendiri Masyumi mulai melakukan hubungan kontak pemikiran dengan tokoh-tokoh Islam di Pakistan, Mesir, Saudi Arabia dan Negara-negara Timur Tengah lainnya, puncak dari kuatnya hubungan Natsir dengan ideologi Timur Tengah ini ketika Ia membentuk partai Islam Masyumi yang

menyatukan semua organisasi Islam dalam satu kendaraan politik.

Namun hubungan pemikiran dan ideologi politik antara Natsir dan tokoh-tokoh Timur Tengah ini terhenti pada masa orde baru, ideologi politik Islam simbolistik tidak boleh digunakan lagi dalam partai politik, partai politik tidak diperbolehkan menggunakan asas Islam, ini membuat Natsir dan pengikutnya harus menggunakan cara lain dalam menyebarkan ideologi dan pemikiran Timur Tengah di Indonesia. Melalui berbagai yayasan mereka tidak menyentuh politik praktis lagi namun menyebarkan ideologi-ideologi Timur Tengah melalui yayasan-yayasan sosial dakwah ini.

Berdirilah Dewan Dakwah Islam Indonesia yang dipimpin M. Natsir, Al Haramain pimpinan Hidayat Nur Wahid, As-Shofwah dan El-Data pimpinan Yusuf Harun serta institusi-institusi Islam lainnya yang mengajarkan agama Islam sebagai sarana mentransfer pemikiran dan ideologi Timur Tengah, kedepan nanti lembaga-lembaga dakwah inilah yang menjadi basis partai politik Islam di Indonesia seperti LDK yang mendirikan KAMMI dan berafiliasi ke Partai Keadilan Sejahtera.

Kawan-kawan M. Natsir juga mulai bergabung di Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), begitu juga para alumni-alumni Timur Tengah juga mulai bergabung, dan diantara pengurus DDII ini juga tidak sedikit yang menjadi pengurus pusat di PKS seperti Daud Rasyid dan juga dipartai lainnya seperti PBB, Natsir adalah tokoh Islam Indonesia yang memiliki hubungan baik dengan Personil dan donatur-donatur Timur Tengah dan setelah sepeninggalan Natsir kedekatan hubungan dengan Timur Tengah dilanjutkan oleh kader-kadernya seperti Syuhada Bahri dll.

Setelah tumbang era Soeharto pada tahun 1997, keran ideologi Timur Tengah seolah menemukan jalannya kembali, itu karena dibolehkannya pendirian partai politik berazaskan Islam. Sedari awal PKS memang tidak

menginginkan kader-kadernya masuk dunia praktis namun lebih memilih menggandeng tokoh nasional dalam negeri untuk maju sebagai calon pemimpin namun dengan syarat tokoh bersangkutan haruslah mendukung dakwah PKS, saat itu PKS memilih Amin Rais sebagai tokoh yang sejalan dengan ideologi Timur tengah namun Amin Rais menganggap baju Islam terlalu sempit untuk digunakannya diperpolitikan Indonesia, sikap Amin ini kemudian memaksa tokoh-tokoh tarbiah ini harus mengambil jalan darurat memasuki dunia politik praktis sebagai sarana memperjuangkan dakwah melalui parlemen dan eksekutif.

Era reformasi adalah masa bermunculannya partai-partai yang berazaskan Islam, Komisi Pemilihan Umum mencatat puluhan partai politik berazaskan islam bermunculan belum lagi partai partai nasionalis yang berazaskan ideologi selain islam.

Sejak tahun 1977 hingga 1997 ummat Islam hanya memiliki kendaraan politik Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai yang mengakomodasi kepentingan politik praktis ummat, itu karena pemerintah membatasi pendirian partai politik hanya menjadi dua aliran, Pertama aliran agamis yang tersalurkan dalam PPP dan Nasionalis yang tersalurkan dalam Partai Demokrasi Indonesia.

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang didirikan oleh aktivis dakwah 1980-an yang melihat peluang untuk mendirikan partai politik di tahun 1997 setelah mereka melakukan aktivitas dakwah dan sosialnya melalui jaringan kampus dan sosial kemasyarakatan sebagai reaksi dari tersumbatnya semangat keislaman dalam partai politik praktis.

PKS adalah partai yang mengadopsi ajaran ajaran Hasan Al-Banna dan beberapa pemikir Timur tengah lainnya, Al-Banna adalah seorang tokoh Spiritual Mesir yang mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin pada 1928.

Hubungan PKS dengan IM terus terbina apalagi setelah terlibatnya PKS dalam politik praktis sebagai imbas dari terbukannya keran politik pada era reformasi pada tahun 1997 pasca tumbanganya orde baru dibawah pemerintahan Soeharto.

PKS sebenarnya tidak ingin masuk dunia politik praktis karena pengalaman negara-negara islam yang ketika masuk politik praktis dan mampu memenangkan persaingan secara demokratis akan selalu digulingkan kekuatan global seperti FIS di Al Jazair dan Hamas di Palestina, namun karena mayoritas kader tarbiah menginginkan masuk dunia politik praktis dengan mengacu pada pemikiran IM maka keputusan masuk politik praktis pun diambil secara syura.

Hubungan PKS dengan Timur tengah merupakan hubungan yang terbentuk jauh sebelum institusi ini terlibat dalam politik praktis, karenanya pengaruh ideologi Timur tengah di partai ini sangat terlihat dari isu dan kebijakan yang diangkat .

PKS sering membawa isu Timur tengah terutama kasus kemerdekaan Palestina yang masih terjajah Zionis Israel, dan dalam beberapa kesempatan juga melakukan pendekatan ke konsetuennya dengan kasus keharusan Palestina merdeka sebagai bagian dari *Ukhuah Islamiyyah Alamiyyah*.

Pengaruh ideologi Timur tengah terhadap pendirian partai politik Islam di Indonesia mulai terlihat dari penggunaan Azas ideologi partai yang tak bisa dikompromi lagi yaitu keharusan penggunaan azas Islam atau Al-Quran dan Hadist.

Ideologi Timur tengah ini kemudian mampu mendapat simpati rakyat Indonesia bahkan mempengaruhi tokoh-tokoh pendiri partai politik Islam terutama PKS, PBB dan juga PPP hingga kemudian mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan politik nasional.

Kebijakan PKS terhadap masalah-masalah Nasional mulai terlihat adanya pengaruh ideologi Timur tengah, seperti maraknya pendirian bank-bank syariah dan semakin banyaknya Investor Timur tengah yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, PKS juga secara tersirat berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai negara bercorak Timur tengah, yang konsisten dalam menjalankan syariat islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semua itu adalah bukti betapa ideologi Timur tengah mulai mmenancarkan kekuatannya di wilayah politik praktis setelah sebelumnya mereka menguatkan kekuatannya diarea sosial kemasyarakatan.

### **Rumusan Masalah**

Hubungan yang sangat lama terjalin antara Indonesia dan Timur tengah dan mayoritas penduduk Indonesia yang muslim, juga perhatian Timur tengah terhadap Indonesia disisi lainnya menjadikan pengaruh ideologi Timur tengah di Indonesia makin tak terbandung.

Oleh sebab itu tim peneliti merumuskan pertanyaan yaitu: Bagaimanakah pengaruh ideologi Timur tengah ( IM ) di Indonesia khususnya terhadap tokoh-tokoh PKS yang kemudian mempengaruhi kebijakan politik PKS yang bercorak Timur tengah ?

## II. LANDASAN TEORI

### Teori Musyarakah Siyasiah

Teori Musyarakah Siyasiah<sup>1</sup> adalah teori yang digunakan Ikhwanul Muslimin dalam membenarkan partisipasi politik kelompok islam yang secara ideologi pemikiran berbeda dengan sistem yang dianut sebuah bangsa, seperti Indonesia sebuah negara yang islam bukanlah satu-satunya agama resminya.

Musyarakah Siyasiah adalah partisipasi politik sebuah kelompok yang tidak memiliki ide dan sarana yang sama dengan mayoritas masyarakat muslim namun tetap digunakan karena memiliki landasan historis dengan realita sejarah para salaf Shalih dan para nabi nabi terdahulu

Tujuan dari musyarakah siyasiah adalah menjamin kekuasaan berada ditangannya walau ideologi antar dua komunitas sangat bersebrangan dan tentunya dengan tidak meninggalkan ideologi dan ciri khas partai islam yang menerapkan islam sebagai prinsip bersikap dan berprilaku.

IM menganggap Musyarakah ini adalah sebuah pilihan alternatif ditengah tidak adanya pilihan-pilihan lain yang lebih memuaskan, pilihan musyarakah dipilih karena tetapnya sebuah ideologi berdiri dan selanjutnya mampu menekan atau melakukan bergaining terhadap pemerintahan yang berkuasa.

Alasan yang digunakan IM dalam membenarkan musyarakah adalah kisah nabi Yusuf yang megajukan diri sebagai bendahara Mesir padahal Mesir saat itu bukan lah negara islam namun yusuf tetap menjabat jabatan tersebut dan mulai melakukan perbaikan dengan memanfaatkan jabatan yang diterimanya itu.

Najasyi juga salah satu raja yang menggunakan teori ini, walaupun ia berbeda dengan komunitas Habasy namun ia tetap memikul jabatan sebagai raja ditengah komunitasnya yang hampir semuanya adalah berfaham berbeda dengan nya.

Alasan ketiga musyarakah ini adalah karena kemashlahatan yang sangat besar jika negara mampu menjamin keberkangsungan daakwah dan negara tidak lagi bermusuhan dengan dakwah, karena alasan inilah musyarakah dianggap sebagai pilihan yang paling tepat guna keberlangsungan dakwah.

## III. METODE PENELITIAN

Dalam setiap penelitian ilmiah, maka sangat diperlukan adanya metodologi agar dapat mengarahkan peneliti atau penulis kepada tujuan dan target penelitian itu sendiri .

Sebagai kelaziman dalam kajian dan studi tentang masalah masalah sosial dan politik, maka pendekatan kualitatiflah pilihannya.

Penelitian dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam terhadap setiap masalah yang dilakukan dengan mengetahui dan memverifikasi berbagai teori atau konsep terdahulu agar dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dan tekhnologi<sup>2</sup> .

Setiap penelitian kualitatif, maka diperlukan penentuan terhadap skala prioritas terhadap respon atau variabel yang ditentukan secara selektif, bukan didasarkan pada banyaknya jumlah yang akan diteliti.

Maka dalam penelitian sosial diperlukan salah satu pendekatan yaitu dengan mendapatkan data primer, skunder dan tertierinya.

Penelitian ini akan memfokuskan penelitiannya pada ada tidaknya pengaruh pemahaman ideologi Timur tengah terhadap partai politik Islam di Indonesia yaitu PKS .

Partai islam yang dimaksud disini adalah PKS, dan hal ini mendiskualifikasi PAN dan PKB dari partai politik Islam karena dalam AD ART nya tidak mencantumkan azas islam walau massa kedua partai ini adalah kalangan organisasi islam terbesar Indonesia demikian juga PPP dan PBB karena suaranya terus mengalami penurunan dari pemilu ke pemilu.

Karenanya berbagai data dan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian yang ditentukan untuk ditelaah secara mendasar dan mendetail<sup>3</sup> .

## IV. PEMBAHASAN

Ikhwanul Muslimun adalah sebuah kelompok islam yang didirikan seorang tokoh islam bernama Hasan Al-Banna pada tahun 1925 di Mesir yang konsentrasi dakwahnya ada pada slogan menjadikan islam sebagai solusi hidup masyarakat.

IM adalah kelompok yang penyebarannya sangat agresif ditandai dengan hampir disemua negara islam ada cabangnya yang berdiri, Qordhowi menyebut bahwa penyebaran kelompok

<sup>1</sup> Taufiq Yusuf Al Wa`I, *Al Fikr As Syiasy Ikhwanul muslimun*, 2001, Ar Risalah

<sup>2</sup>M. Hasyim, *Metodologi Penelitian sosial*, PMB, LIPI,1999.

<sup>3</sup> Anas Saidi, *Metodologi penelitian sosial*, LIPI 2001.

ini sudah tersebar di 80 negara-negara islam dengan berbagai pola nama dan organisasi<sup>4</sup>.

Simbol organisasi ini adalah dua pedang yang melingkari Al-Quran dan memiliki pedoman serta misi yang berbunyi Allah Tujuanku, Rasul Tauladanku, Al-Qur'an pedoman hidupku, Jihad jalan hidupku, Mati Syahid adalah cita-cita tertinggi. Lima prinsip ini adalah simbol baku organisasi islam ini secara Internasional.

Jika melihat prinsip yang ada pada PKS dan yang ada pada IM maka kedua organisasi ini memiliki kesamaan prinsip dan semboyan dan juga seruan yang disuarakan juga hampir mirip sama, seperti slogan islam adalah solusi dan juga masalah-masalah internasional lainnya yang mereka suarakan namun memang secara organisasi tidak memiliki hubungan yang verbal seperti pernyataan Ali Ahmadi dan Budianto petinggi PKS saat Tim melakukan wawancara dengan mereka beberapa waktu lalu di Jakarta.

### **Indonesia dan Pengaruh Pemikiran Timur tengah**

Indonesia adalah ladang subur tempat berkembangnya semua pemikiran dan ideologi Timur tengah, fenomena itu terlihat dari berdirinya banyak yayasan atau lembaga yang beraliran ketimur tengah ditanah Nusantara ini.

Pengaruh pemikiran Timur tengah di Indonesia mengalami beberapa tipologi yang sangat unik, keaneka ragaman tipologi ini sangat terkait dengan tipikal negara negara Timur tengah yang sangat banyak corak dan ragam ideologi yang berkembang disana dan keragaman ideologi Timur tengah itu mempengaruhi pembawa pemikiran Timur tengah di Indonesia ada yang keras, moderat dan juga sekuler.

Di Timur tengah ada gaya kepemimpinan otoliter kerajaan seperti Kerajaan Saudi Arabia, negara Kwait dan umumnya negara negara Teluk, juga ada negara Demokrasi namun sangat mengekang kebebasan seperti Mesir, namun disisi lain sangat berekembang pemikiran partai oposisi penentang partai yang sedang berkuasa yang diorganisir oleh kelompok Ikhwanul Muslimun.

Ada juga corak Lebanon yang sepertinya agak mirip dengan model Indonesia yang mentolerir semua ideologi baik islam ataupun ideologi lainnya seperti Bhinika Tunggal Ika. Orang Lebanon memiliki Watsiqah Thaif yang merupakan alat pemersatu semua ideologi dan agama yang berkembang disana.

Karenanya tak mudah menyimpulkan satu ideologi Timur tengah yang menguasai sosial politik masyarakat Indonesia karena bercampur baurnya para alumni Timur tengah di Indonesia, alumni saudi membawa ajaran Wahabi, alumni Mesir membawa IM, alumni Lebanon membawa faham pluralisme dan bermacam aliran Timur tengah lainnya.

Oleh sebab itu Indonesia adalah lahan subur tempat berkembangnya ideologi Timur tengah di Indonesia yang jika faham-faham ini tidak segera mengikuti Nation Building Indonesia maka beragam ideologi timur tengah ini akan menjadi ancaman serius kebinikeaan Indonesia.

### **Penopong pemikiran Timur Tengah di Indonesia**

#### **Pondok Pesantren**

Pondok pesantren adalah tempat suburnya faham ideologi Timur tengah berkembang pesat, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama formal yang mengajarkan ilmu-ilmu islam kepada santri-santrinya.

Para pendidik pondok pesantren umumnya berasal dari alumni-alumminya yang telah menyelesaikan pendidikan formalnya baik didalam ataupun diluar negeri, namun alumni pondok pesanteren jika keluar negeri untuk belajar ilmu pengetahuan islam maka selalu pergi menuju Timur tengah sebagai rujukan utamanya, terutama Negara-negara yang banyak menyediakan beasiswa dengan jumlah yang lumayan banyak seperti Saudi Arabia, Mesir, Kuwait ataupun Qatar<sup>5</sup>.

PKS memiliki basis pondok pesantren karena sebagian besar pendiri partai ini adalah alumni-alumni Timur tengah yang pernah mengenyam pendidikan agama di Negara padang pasir. Pondok pesantren Khusnul Khatimah yang terletak di Kuningan Jawa Barat adalah salah satu pondok pesantren yang menjadi basis partai Keadilan Sejahtera yang hampir sebagian besar tenaga pendidikny adalah alumni Timur tengah.

Pondok Pesantren Rafah yang terletak di Bogor juga contoh lain dari basis PKS di Pondok pesanteren, pesantren pimpinan Nasir Zen ini juga merupakan tokoh PKS yang menjadi pendiri Partai Keadlian pada 1999 dulu sebelum berubah menjadi PKS.

<sup>4</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Fikih Daulah*, 1998, Dar Risalah, Mesir

<sup>5</sup> Satu Universitas di Saudi bisa menyediakan puluhan beasiswa khusus Indonesia, mislanya Islamic University yang terletak di kota Madinah menyediakan lebih dari 30 beasiswa bersih bahkan mendapat tunjangan biaya hidup 800 real/bulan, belum lagi universitas atau negara lainnya seperti Ummul Qura, Imam University. Mesir, Yordania, Marokko dll.

### Masjid

Bagi penyebar ideologi Timur tengah, Masjid adalah tempat yang paling netral untuk menyebar luaskan faham Timur tengah, itu karena Masjid adalah tempat terstrategi dan teraman serta ternetral untuk menyebarkan ideologi ini.

Masjid dianggap sebagai tempat berkumpulnya semua umat islam dan tak mengenal batas-batas aliran faham politik dan faham lainnya, karenanya masjid kemudian menjadi arena rekrutmen partai politik salah satunya adalah PKS.

PKS dengan bermodalkan alumni sarjana Timur tengah yang menguasai ilmu agama secara baik selalu membidik masjid sebagai tempat rekrutmen, jamaah masjid secara berkala dikunjungi dan menjadualkan kajian-kajian islam yang kemudian secara sistematis dan gradual membentuk para pengikutnya mau dengan sukarela dan semangat mengikuti partai politik yang diyakininya.

Masuknya PKS dimasjid-masjid dan kemudian mulai menguasai aktivitas masjid menyebabkan ketua Muhammadiyah dan NU Din Syamsuddin dan Hasyim Muzadi mengeluarkan keputusan resmi yang melarang kegiatan politik didalam masji-masjid Muhammadiyah atau NU dan mengingatkan jamaahnya agar berhati hati dengan mulai masuknya PKS kedalam masjid masjid NU atau Muhammadiyah<sup>6</sup>.

### Kampus

PKS memasuki kampus melalui pendekatan LDK-LDK (Lembaga Dakwah Kampus) yang ada, PKS secara rutin mengadakan rekrutmen oleh senior-senior kampus yang memang secara pemikiran telah terpengaruhi ide-ide PKS, kegiatan-kegiatan ini secara berkala kemudian membuat pola rekrutmen politik secara massif dan gradual.

Kampus adalah lapangan rekrutmen luas yang dijadikan PKS sebagai ajang rekrutmen kader-kadernya secara militan dan kuat sehingga memang dilapangan terlihat mahasiswa mahasiwa berideologikan PKS begitu kuat dengan prinsipnya yang memang telah dibentuk untuk menjadi kader-kader partai yang handal dengan serangkaian latihan dan ujian-ujian kompetisi.

### PKS dan Pemikiran Hasan Al-Banna (Ikhwanul Muslimin)

Hasan Al-Banna adalah pendiri organisasi islam terbesar didunia saat ini, Ikhwanul Muslimin yang merupakan organisasi yang sangat agresif dan paling banyak memiliki kader diseluruh Mesir serta juga dunia islam. Organisasi ini didirikan pada tahun 1928 di Mesir.

PKS secara institusi dan struktural organisasi memang tidak memiliki hubungan dengan organisasi ini namun secara pemikiran sangat kental dan terbaca adanya pemikiran Ikhwanul Muslimin dalam partai politik ini.

Jika melihat AD/ART Ikhwanul muslimin maka organisasi ini secara nyata memang mengakui akan adanya cabang-cabang mereka di seluruh dunia dengan menggunakan nama Ikhwanul Muslimin seperti di Yordania, Lebanon ataupun di beberapa negara Timur tengah lainnya.

Dalam peraturan IM kepengurusan cabang Internasional disusun atas usulan dan keputusan cabang setempat, pusat hanya memberikaan arahan-arahan struktural terkait kebijakan jangka panjang, karenanya cabang memiliki otonomi khusus yang sangat luas dalam menentukan sikap dan kebijakan jangka pendek, cabang harus memikul kewajiban menyebarkan visi misi IM ke seluruh anggotanya secara massif dan teratur<sup>7</sup>, karenanya setiap buku best seller timur tengah terutama yang ditulis anggota DPP IM pasti akan diterjemahkan secara cepat di Indonesia. Seperti karangan Qardhawi dan tokoh IM lainnya.

Karenanya secara pemikiran dan misi IM dan PKS begitu dekat dan seolah mirip atau bahkan sama dan diwebsite resmi IM PKS disebut sebagai cabang IM yang ada di Indonesia padahal ada organisasi di Indonesia menggunakan nama IM yang dipimpin oleh salah seorang Habib namun IM pusat tak mengakuinya sebagai cabang resmi IM di Indonesia<sup>8</sup>.

Fakta-fakta inilah yang menguatkan bahwa IM dan PKS memiliki persamaan yang sangat nyata dan terbukti dengan isu-isu yang diangkat IM dan PKS yang juga hampir sama, diataranya adalah

<sup>7</sup> Diantara visi misi IM adalah : Allah Tujuanku, Muhammad Suri Tauladanku, Al-Quran pedoman Hidupku dan mati dijalan Allah adalah cita-citaku tertnggi, ada 3 syarat bergabung menjadi anggota im internasional salah satunya adalah memiliki tanda pengakuan yg dikeluarkan mursyid amIM.

<sup>8</sup> Lihat dilampiran contoh pengakuan IM pusat terhadap PKS sebagai cabangnya di Indonesia.

<sup>6</sup> Ilusi Negara Islam, LibForAll Fondation, 2009, Desantara Utama Media, Jakarta

kemerdekaan Palestina dan juga isu Islam sebagai Solusi bernegara dan berbangsa.<sup>9</sup>

Karenannya isu yang diangkat oleh IM di Mesir selalu menjadi isu utama juga di PKS sebagai pertanda akan adanya hubungan yang sangat kuat antara IM dan PKS secara pemikiran walau memang secara organisasi hubungan itu tak terbukti.

Fakta ketidak ada hubungan antara PKS dan IM ini terlihat dari hasil wawancara Tim peneliti Al Azhar dengan tokoh tokoh PKS seperti Ali Ahmadi dan Budianto Ketua hubungan luar negeri PKS yang mengatakan jika ada isu yang diangkat PKS dan memiliki kemiripan dengan isu yang diangkat IM maka itu tidaklah menjadikan PKS adalah bagian dari IM, kemiripan yang ada adalah karena memang muslim dimanapun berada satu bagian tubuh yang tak mungkin bisa terpisahkan.

Walau kesamaan isu yang diangkat kedua organisasi ini hampir mirip namun secara organisasi memang tak ada bukti faktual akan adanya hubungan internasional dua organisasi ini namun kesamaan-kesamaan ini menyisakan banyak pertanyaan akan masa depan PKS yang tidak terus terang dengan ideologi yang ingin dikembangkan di Indonesia. Dan inilah yang kemudian menjadi tanda tanya partai politik lain terhadap sikap ketidak terus terang PKS ini.

### Sikap PKS terhadap azas partai politik

IM adalah organisasi yang secara keras menolak asas lain sebagai asas berbangsa dan bernegara, menurut organisasi ini Al-Quran dan Sunnah atau Islam adalah landasan organisasi dalam mengambil setiap kebijakan yang terkait dengan berbangsa dan bernegara<sup>10</sup>.

Menurut IM tak akan ada ideologi yang bisa bertahan lama selain ideologi Islam. Komunis, Sosialis dan semua ideologi lainnya tak akan mampu bertahan sebagaimana ideologi Islam mampu bertahan seperti yang terlihat saat ini, seberat apapun cobaan yang dihadapi islam, semua itu tak membuat ideologi ini mati, malah bahkan justru sebaliknya semakin ditekan ideologi ini semakin menguat, karenanya Al-Quran dan Islam adalah keputusan final IM, IM kemudian terkenal

dengan simbolnya *Al Islam Hual Hill* ( Islam adalah Solusi kehidupan)

Sikap PKS hampir sama dengan sikap IM begitu sangat kuat dengan penggunaan ideologi Islam dan menganggap bahwa islam adalah final dan tidak lagi mengkotak kotakkan antara nasionalisme dan islam karena dua kata ini bagi PKS adalah dua istilah yang bisa berjalan beriringan, serta semangat mengkotak-kotakkan dua istilah ini hanya untuk tujuan politik sesaat yang harus ditinggalkan.

PKS dalam AD ART nya menyebut Islam adalah Asas partai walau tetap mengakui Pancasila dan UUD 1945 namun tidak mau meninggalkan asas Islam sebagai simbol berbangsa bernegara sebuah sikap yang begitu kuat sama seperti yang tunjukkan IM di Mesir<sup>11</sup>.

Kesamaan kedua sikap antara IM dan PKS ini kemudian ketika Tim melakukan wawancara juga menyimpulkan hasil wawancara yang sama yaitu dua sikap ini tidaklah menjadikan IM dan PKS adalah satu organisasi yang sama dibawah satu komando internasional, semua sikap dan keputusan PKS ini adalah hanya kebetulan semata dan tak memiliki variabel apapun bagi dua organisasi ini.

### Sikap PKS terhadap penerapan Syariat Islam di Indonesia

Seorang peneliti asing Willian R Liddle mengatakan bahwa Indonesia ketika keran perpolitikan dalam negerinya sudah mulai terbuka maka gerakan Islam akan lebih bersifat Skripturalis<sup>12</sup> penerapan Syariat islam akan terjadi menjadi lebih masif serta lebih agresif, kenyataan serta fenomena dari teori Liddle itu terlihat dari pemberlakuan Aceh hukum islam sebagai hukum bermasyarakat daerahnya.

Setelah Aceh memberlakukan formalisasi hukum islam maka puluhan daerah juga mulai mencoba melakukan perubahan undang-undang daerahnya dengan mengakomodasi formalisasi syariat Islam, maka tuntutan pemberlakuan hukum islam di Jawa, Sumatera dan juga Sulawesi menjadi lebih bervariasi.

Di Jawa Barat, misalnya, Tasikmalaya, Cianjur, Garut dan Provinsi Banten menuntut pemberlakuan hukum Islam. Bupati Garut membentuk Lembaga

<sup>9</sup> Lihat ikhwanonline.com di bagian kabar anggota yang mengatakan PKS adalah salah satu cabang IM yang berpusat di Mesir.

<sup>10</sup> Yusuf Al Wa'iy, Fikr Syiasy Ikhwanul Muslimin, 2000, Dar Risalah, Mesir

<sup>11</sup> Lihat AD/ART PKS 2007

<sup>12</sup>William R. Liddle, "Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia", dalam Toward a New Paradigm: Recent Development in Indonesian Islamic Thought, Mark R Woodward (ed) (Arizona: Arizona State University, 1996), 323-56

Pengkajian Persiapan Penerapan Syariat Islam dalam rangka pemberlakuan syariat islam di daerahnya.

Di Sulawesi Selatan, enam dari 24 kabupaten secara tegas memberlakukan hukum islam. Demikian juga di Sumatera, seperti di Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Riau

Meskipun di Jawa Timur secara umum gejala ini kurang begitu populer, di Pamekasan penerapan hukum Islam bahkan diberlakukan secara langsung melalui Surat Edaran Bupati No 450 Tahun 2002<sup>13</sup>.

PKS melihat fenomena formalisasi syariat islam ini sebagai wajah demokrasi yang harus dihormati, pernyataan PKS yang terkesan mendukung ini diungkapkan Hidayat Nurwahid.

Penyataan Hidayat ini menjadi bisa difahami ketika dihubungkan dengan sikap PKS dalam penegakan syari'at Islam. PKS tidak hanya dikenal sangat mendukung penerapan syari'ah tetapi juga merancang sejumlah tahapan pelaksanaannya, yaitu : gerakan individual, gerakan sosial dan pendidikan, gerakan sosial politik, gerakan legislasi, dan konstitusionalisme<sup>14</sup>.

Menurut PKS, terdapat tiga arti penerapan syari'at Islam. Pertama, mengkomodasi satuan-satuan hukum (perdata dan pidana) dalam konstitusi dan undang-undang serta berbagai penjelasan hukumnya. Kedua, mengisi segenap ruang konstitusi dan undang-undang dengan berbagai penjabaran hukumnya, di Indonesia, dengan ajaran Islam, sehingga dengan pengertian ini Islam dipandang sebagai aspek utama yang mewarnai seluruh sistem hukum nasional.

Fakta bahwa partai politik seperti PKS turut serta dalam gerbong formalisasi syari'at Islam, PKS berhasil menebar simpati di kalangan masyarakat luas, sehingga jika itu berhasil, maka berdasarkan tahapan strategi penerapan syari'at Islam oleh PKS, setidaknya tahapan pertama telah tercapai. Hanya saja, dalam perkembangan selanjutnya, PKS tidak lagi berfungsi sebagai partai politik an sich

Apabila IM memiliki sikap tegas bahwa syariat Islam adalah satu-satunya hukum yang harus ditegakkan, hal ini berbeda dengan sikap PKS. Pasca pemilu 2004 PKS memiliki sikap yang tidak tegas dalam hal pemberlakuan syariat islam di Indonesia, PKS melihat penerapan Syariat islam janganlah hanya dilihat dari rajam atau Qisas saja

namun Syariat islam haruslah dilihat dari semangat dan spiritual, seperti syariat tidak boleh mencuri, korupsi atau larangan lainnya, karenanya penerapan Syariat islam haruslah dilakukan secara gradual dan tertata rapi hingga rakyat memahami hakikat penerapan syariat islam<sup>15</sup>.

Sikap PKS yang tidak tegas ini ketika Tim melakukan wawancara dengan tokoh dan anggota PKS mengatakan bahwa penerapan syariat islam secara utuh membutuhkan waktu yang panjang, itu agar masyarakat siap menerimanya, karena masyarakat belum memahami betul hakikat syariat islam ini, karenanya maka bahasa yang dipakai PKS saat ini adalah bahasa-bahasa kiasan agar masyarakat jangan apriori terebih dahulu<sup>16</sup>.

PKS tidak menyuarakan isu penerepan syariat islam secara konstitusi namun Syariat islam adalah kehidupan realita sosial masyarakat dan bukan saja hanya dalam konstitusi hukum yang terealisasi dari sikap tidak korupsi dan islam yang mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat .

Hidayat Nur Wahid sebagaimana yang dikatakan dalam wawancara M Salaby mengatakan bahwa syariat Islam jangan difahami secara kaku dan Dogmatis, penerapannya haruslah sesuai dengan aturan dan undang-undang sebuah negara, persatuan dan kesatuan ummat haruslah diutamakan, Tindakan refresif hanyalah akan mengundang arus penolakan yang lebih luas, penerapan syariat islam haruslah dilakukan pada nilai-nilai berpolitik yang santun dan bersih, tidak KKN dan menguatkan SDM untuk pembangunan bangsa dan negara<sup>17</sup>.

### Sikap PKS terhadap NKRI

Dalam Musyawarah Majelis Syura X, PKS memiliki sikap terkait dengan NKRI. Menurut PKS, NKRI adalah final, PKS tak ingin memisahkan diri dari nusantara karena menurutnya persatuan Indonesia adalah final yang harus dijunjung tinggi, nilai nilai persatuan yang terkandung haruslah diamalkan secara verbal.

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Wawancara Tim Peneliti Al-Azhar dengan PKS pada 17 Mei 2010

<sup>17</sup> M. Salaby, *Pemikiran Politik Hidayat Nur Wahid, Penerapan Syariat Islam di alam demokrasi studi kasus PKS*, , tanpa publikasi

<sup>13</sup>Masa Depan Syari'at Islam di Indonesia (Kajian Analitis tentang Prospek Formalisasi Hukum Islam, Pradana Boy ZTF.

<sup>14</sup>Nandang Burhanuddin, *Penegakan Syari'at Islam Menurut Partai Keadilan*, Jakarta: al-Jannah Pustaka, 2004), h. 107-118.8

Teori Khilafah<sup>18</sup> yang dikembangkan oleh IM adalah teori lunak yang tidak harus menjadikan sebuah negara memisahkan diri dari sebuah komunitas, sebuah negara tetap bisa menjadi negara dengan segala ideologinya, namun yang dituntut IM adalah keharusan negara tersebut menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam berbangsa dan bernegara<sup>19</sup>.

Konsep NKRI yang usung oleh PKS dengan apa yang disebut IM tak terlihat adanya pertentangan, jadi bisa saja NKRI tetap utuh, namun secara budaya dan politik Indonesia harus menganut nilai-nilai islam yang luhur seperti yang sering diutarakan tokoh-tokoh PKS.

Namun wawancara Tim dengan Dewan Syariah atau Biro Hubungan luar negeri PKS menyatakan fakta-fakta tersebut adalah fakta *debatable* dan tidak ada kaitannya dengan kesamaan organisasi secara struktural namun semua itu hanya kesamaan ajaran islam yang merupakan sumber berfikir setiap muslim.

#### **PKS, Peluang dan tantangan pada pemilu 2014**

Pemilu 2009 menghasilkan PKS sebagai satu-satunya partai politik islam yang mampu mempertahankan perolehan suaranya dengan berada pada kisaran 7 persen, banyak analisa yang menganalisa sebab-sebab keberhasilan PKS mempertahankan perolehan suaranya, diantara analisa itu adalah banyaknya perpecahan partai politik islam selain PKS, PPP pecah antara kubu Bakhtiar dengan Surya Dharma Ali, PKB antara Gusdur dengan Muhaimin dan PBR antara Zainal Ma'arif dengan Ade Nasution.

Analisa lain menyebutkan bahwa PKS berhasil membuka diri menjadi partai yang terbuka dan tidak inklusif lagi sehingga terlihat dalam PKS banyak non Muslim yang muncul mewakili kursi DPRD di beberapa daerah.

Semua analisa kesuksesan PKS ini jika bisa dipertahankan maka bisa saja PKS dipemilu 2014 nanti menaikkan perolehan suaranya dan akan masuk menjelma menjadi partai tiga terbesar secara nasional.

Namun yang harus dipikirkan PKS adalah jika rancangan undang-undang partai politik yang mengusulkan bahwa partai politik dalam negeri tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan

organisasi internasional, jika rancangan UUD ini berhasil digolkan maka PKS 2014 nanti riwayatnya akan selesai walau memang tak ada bukti verbal dan kuat akan keterlibatan PKS namun jika bukti-bukti awal dalam penelitian ini menjadi bukti perdana menguatkan hubungan PKS dengan IM maka itu pertanda buruk bagi partai berlambang ka'bah ini<sup>20</sup>.

Penelitian ini juga kedepan seharusnya mampu menyempurnakan hasil penelitiannya ini dengan mendatangi DPP IM di Mesir untuk menguatkan akan ada tidaknya hubungan kedua organisasi ini, dan keputusan-keputusan politik PKS adalah buah dari keputusan besar DPP IM yang seolah PKS hanya menjalankan keputusan-keputusan tersebut.

#### **V. KESIMPULAN**

IM dan PKS adalah dua organisasi islam yang sama-sama mengusung prinsip dan nilai bahwa Islam adalah solusi (*Al-Islam Hual Hill*), visi dan misi kedua organisasi islam ini juga relatif sama, itu terlihat dari slogan-slogan dan visi misinya yang terkenal seperti Allah Tujuanku, Muhammad Suri Tauladanku, Al-Quran pedoman hidupku dan Mati dijalan Allah adalah cita-cita tertinggi<sup>21</sup>. Namun persamaan ideologi PKS dan IM ini diakui tokoh PKS sebagai sebuah kesamaan organisasi dan kebetulan semata dan bukan merupakan sebuah ikatan hirarki organisasi.

Secara hirarki struktural, PKS memang tidak memiliki indikasi serta bukti akan keterlibatannya dengan organisasi terbesar dunia tersebut, namun sebagai bukti awal akan keterlibatan PKS sebagai bagian dari gerakan IM adalah pernyataan resmi website IM yang bermarkas di Mesir yang secara gamblang mengatakan bahwa PKS adalah bagian (*Alfar`ul Al-Qathary*) dari gerakan IM<sup>22</sup>.

Jika melihat visi misi PKS dan membandingkannya dengan visi misi gerakan IM maka ditemukan dengan kasat mata akan adanya kesamaan ideologi dan visi dalam dua organisasi islam ini, walau pihak PKS tidak mengakui adanya kesatuan struktur organisasi tetap bersikukueuh bahwa PKS tidak memiliki hubungan apapun

<sup>18</sup> IM mengusung Khilafah secara natural yang terbentuk dari benih-benih pribadi muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim dan Negara islam lalu khilafah islamiyah

<sup>19</sup> Yusuf Al Wa'I, *Al Fikr As Syiasy lil Ikhwan*, Dar Risalah, 2000, Mesir

<sup>20</sup> Dalam undang-undang pemilu sebelumnya di jelaskan partai politik tidak boleh memiliki hubungan dengan organisasi Internasional, lihat peraturan UUD pemilu 2004, KPU Jakarta

<sup>21</sup> Lihat Majmu Rasail Hasan Al-Banna yang memuat prinsip dasar gerakan Ikhwanul Muslimin

<sup>22</sup> Lihat lampiran

dengan IM termasuk hubungan organisai, walaupun disatu sisi bahwa kedekatan tokoh PKS dengan IM terjalin dengan begitu intens namun itu PKS akui hanya sebatas kedekatan antara sesama muslim semata.

Pengakuan situs resmi gerakan IM di Mesir yang menyebut bahwa PKS adalah cabang resmi dari IM, namun begitu, pengakuan website ini tidaklah merupakan bukti valid akan adanya ikatan dua organisasi ini, justru hubungan akan menjadi kuat dan valid serta fakta yang tak terbantahkan jika IM pusat Mesir memiliki surat pengangkatan cabangnya di Indonesia yang merupakan syarat diakuinya sebuah cabang internasional yang berdiri di negara lain<sup>23</sup>, jika pernyataan ini bisa dibuktikan, maka akan didapati fakta bahwa PKS adalah bagian dari IM.

Dalam beberapa kebijakan politik nasional dan Internasional yang diangkat PKS selalu saja memiliki kemiripan dengan kebijakan yang diangkat IM, itu terlihat dari kebijakan terhadap masalah Palestina, Islam adalah solusi (formalisasi islam dalam undang undang positif) serta visi misi yang sangat terlihat sama bahkan merupakan kopian dari visi misi IM yang bermarkas di Mesir.

Jika bukti pernyataan IM pusat bisa diperoleh maka pengakuan itu menjadi bukti nyata akan hubungan PKS sebagai cabang IM dan pastilah memiliki agenda-agenda yang sama dengan IM yaitu menjadikan islam sebagai solusi dari masalah-masalah bangsa yang ada dengan menformalkan ajaran islam dalam undang-undang Indonesia.

Karenanya penelitian ini akan menjadi lebih kuat dan lebih faktual jika penelitian ini langsung mengecek adanya cabang-cabang yang dimiliki IM diseluruh dunia dengan surat pernyataan resmi dari DPP IM (*Maktab Irsyad*), sebab jikalau ada persamaan visi dan misi maka banyak alasan yang bisa digunakan PKS untuk membantah hubungan organisasi IM dengan organisasi politiknya ini.

Jika PKS adalah bagian dari IM maka yang terjadi sebenarnya adalah kebijakan-kebijakan politik PKS yang diusung selama ini adalah sebenarnya perwujudan dari kebijakan jangka panjang IM, namun jika keterlibatan hubungan ini tak didapati maka kebijakan PKS yang kadang mirip dengan IM itu murni hanya kebetulan atau kemiripan semata saja, dan wawancara Tim dengan para tokoh PKS adalah fakta yang tak terbantahkan akan ketidak ada hubungan antara PKS dan IM.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azyumardi Azra, 2005, *Jaringan Ulama Nusantara-Indonesia abad 17-18*, Mizan Bandung.
- [2] Azyumardi Azra, 2007, *Jejak-Jejak Jaringan Kaum Muslimin*, Hikmah, Jakarta
- [3] Ahmad Mansur Suryanegara, 1995, *Menemukan Sejarah*, Mizan, Bandung.
- [4] Miriam Budiardjo 2004, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cetakan duapuluh enam, Gramedia, Jakarta.
- [5] Miriam Budiardjo, 2006, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia, Jakarta
- [6] Greg Fealy & Anthony Bubalo, 2007, *Jejak Kafilah, Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, cetakan pertama, Mizan, Bandung.
- [7] Hisyam, M, 1999, *Metodologi Penelitian Sosial*, PMB, Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- [8] Juwono Sudarsono, 1976, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Gramedia, Jakarta.
- [9] LibForAll Fondution, 2009, *Ilusi Negara Islam*, Desantara Utama Media, Jakarta
- [10] Moleong, Lexi, J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- [11] M. Salaby, *Pemikiran Politik Hidayat Nur Wahid, Penerapan Syariat Islam di alam demokrasi studi kasus PKS*, tanpa publikasi
- [12] Mukaddimah Ibnu Khaldun, 2000, *Ibnu Khaldun*, Dar Jail Bairut
- [13] Masa Depan Syari'at Islam di Indonesia (Kajian Analitis tentang Prospek Formalisasi Hukum Islam, Pradana Boy ZTF.
- [14] Mas`ud Mukhtar, 1990, *Ilmu Hubungan International, Disiplin dan Metodologi*
- [15] Nandang Burhanuddin, 2004, *Penegakan Syari'at Islam Menurut Partai Keadilan*, Jakarta: al-Jannah Pustaka.
- [16] Natalie Mobini Kasheh, 2007, *Hadrami Awakening*, Akabar Media Eka Sarana,
- [17] Alan Ware, 1977, *Political Party and Political System*, Oxford
- [18] William R. Liddle, 1996, *Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia, dalam Toward a New Paradigm: Recent Development in Indonesian Islamic Thought*, Mark R Woodward (ed), Arizona, Arizona State University.

<sup>23</sup> Lihat Lampran AD ART IM